

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Suatu penelitian diharapkan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Hasil penelitian yang dibahas berasal dari beberapa instrumen, kemudian menggunakan analisis dan metode yang telah ditentukan. Pada bab ini, penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas hasil penelitian tersebut.

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa**

Desa kebloran merupakan desa yang terletak di kecamatan Kragan, kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Desa kebloran termasuk dalam daerah pesisir yang terletak di sebelah utara Laut Jawa sebelah selatan Mojokerto sebelah barat Karanganyar dan sebelah timur Tanjungan. Jarak desa Bloran dari pusat pemerintahan Kecamatan yaitu 3 km sedangkan dari pusat pemerintahan Kabupaten Rembang berjarak 40 km. Luas wilayah Desa Bloran adalah 142.207. H. Desa Bloran sendiri terdiri dari 11 RT (Rukun Tetangga) dan 2 RW (Rukun Warga).

##### **2. Kependudukan**

Penduduk Desa Bloran berjumlah 2.999 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1505 dan 1494 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan usia penduduk desa Bloran mayoritas berusia 30-44 tahun. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan penduduk desa bloran, mayoritas tingkat pendidikan terakhir adalah SMA, sedangkan pendidikan minoritas penduduk yakni sarjana yang dimana tahun ini hanya 4 penduduk. Mata pencaharian penduduk desa Bloran mayoritas bekerja disektor perikanan yakni nelayan dimana hampir 75% dari total penduduk.

##### **3. Visi dan Misi Desa**

Visi : Menuju masyarakat yang aman, nyaman, mandiri, beriman, dan bertaqwa, juga sejahtera lahir batin.

Misi : Membangun ekonomi yang memadai, Mencitakan swasana belajar mengajar yang nyaman dan representatif, Meningkatkan fungsi dan peran Pemerintah Desa, Memperkecil jarak antara sikecil dan

sikaya dan Pengembangan jaringan kementerian dalam Pembangunan.<sup>1</sup>

## B. Hasil Penelitian

### 1. Data Partisipasi Masyarakat Muslim Pesisir dalam Setiap Tahapan Pengelolaan Dana Desa 2020

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, peranan masyarakat dan pemegang kepentingan desa perlu berpartisipasi bersama dalam setiap tahapannya di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai pada tahap pertanggungjawaban kegiatan yang akan dilakukan. Pemerintah desa Bloran juga melibatkan peran para masyarakat dalam pengelolaan dana desa, karena dengan hal itu masyarakat dapat mengidentifikasi masalah-masalah terkait proses perencanaan program pembangunan desa. Koordinasi antara pihak pemerintah desa dengan masyarakat juga sangat diperlukan guna mewujudkan sebuah pedesaan yang harmonis.

#### a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal dari pengelolaan dana desa dimana pada tahapan ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Data penelitian menjelaskan bahwa tahapan perencanaan ini mengarah pada pembuatan RKP dan RPJM untuk bahan APBDesa dan dari perencanaan ini pula ada tahapannya lagi yaitu pra musdes, musdes dan terakhir musrenbang. Masyarakat disini digabungkan hanya di pra musdes dimana musyawarah dilakukan per wilayah yang dilakukan oleh kepala per wilayah dan anggota BPD dan tujuannya untuk penyaringan kebutuhan masyarakat selama setahun mendatang serta adanya penyampaian pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan dari hasil pra musdes ini digunakan sebagai bahan saat musdes berlangsung dan dari hasil musdes tersebut disepakati dan dibahas kembali pada tahapan.<sup>2</sup>

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahapan awal pengelolaan dana desa yaitu perencanaan agar

---

<sup>1</sup> <http://kebloran-rembang.desa.id/>

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmudi sebagai Kepala Desa di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Balai Desa Bloran pada tanggal 21 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB

dapat tersusun sesuai kenutuhan desa tersebut, akan tetapi data penelitian menjelaskan bahwa masyarakat tidak mengikuti semua tahapan akan tetapi memang ada musyawarah tingkat RT dan ketika masyarakat tersebut tidak bekerja maka dapat mengikuti musyawarah tersebut akan tetapi ketika masyarakat tersebut bekerja maka otomatis tidak dapat mengikuti musyawarah dan pembahasannya hanya menyampaikan kinerja Pemdes dan juga ada usul-usulan dari masyarakat.<sup>3</sup> Selain hal tersebut ada rasa kepercayaan dari masyarakat setempat kepada pemerintah desa Bloran terkait dana yang dikelola oleh pemerintah desa dan karena tidak ada kesimpangan yang terjadi di desa Bloran.<sup>4</sup>

Alasan utama masyarakat tidak melibatkan diri dikarenakan kesibukan dan kepercayaan kepada pemerintah desa. Hal ini juga didukung dengan observasi dan dokumentasi dari peneliti dimana saat musyawarah tingkat dusun banyak masyarakat yang tidak peduli sehingga tidak datang saat acara tersebut dan memberikan alasan bahwa kesibukan mereka lebih utama dan ketika musyawarah tingkat desa dilakukan tidak ada dari pihak masyarakat tetapi ada perwakilan dari masyarakat yang mengikuti musyawarah tersebut. Pada tahapan perencanaan ini masyarakat tidak terlibat dalam semua kegiatan dan hanya terlibat dalam pra musdes saja.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan tahapan kedua dalam pengelolaan dana desa dan pada tahapan pelaksanaan ini membahas tentang pencatatan dan pengeluaran keuangan desa serta adanya tahapan pencairan dana disetiap desa di Indonesia. Data penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan merupakan bentuk pembuatan RAB serta adanya PK

---

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmudi yang bekerja sebagai Nelayan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Bapak Mahmudi pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 13.30 WIB

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Etika yang bekerja sebagai Pedagang Ikan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Ibu Etika pada tanggal 24 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB

(Pelaksanaan Kegiatan) lapangan dan disini tidak semua masyarakat terlibat dalam swakelola.<sup>5</sup>

Selain itu, mekanisme pencairan dana desapun juga bertahap 40-40-20 dan untuk pencairan dana tersebut yang mengajukan adalah PK (Pelaksana Kegiatan) serta verifikasi adalah sekdes dan ketika PK sudah menyampaikan SPP maka tahap selanjutnya yaitu bendahara baru bisa mencairkan.<sup>6</sup>

Partisipasi masyarakat tentu sangat dibutuhkan dalam semua tahapan yang ada pada pengelolaan dana desa dan tak terkecuali partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan, diharapkan pada pelaksanaan yang mengarah pada pembangunan dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja dari desa tersebut agar dapat menyerap tenaga kerja dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Data penelitian menjelaskan bahwa adanya penggabungan musyawarah dimana masyarakat muslim pesisir desa Bloran hanya mengikuti tahapan pengelolaan pada perencanaan dimana musyawarah tingkat desa tersebut dihadiri BPD dan kepala RT setempat lalu memberikan informasi terkait desa, hal ini dilakukan karena tahapan yang lebih dari tiga dan tidak semua masyarakat dapat menyempatkan waktu selain itu agar masyarakat mudah dalam menerima informasi tersebut.<sup>7</sup>

Akan tetapi, partisipasi masyarakat muslim desa bloran pada tahapan pelaksanaan masih kurang dan hanya sebagian masyarakat yang melibatkan diri disaat kegiatan swakelola dilakukan. Data penelitian menjelaskan bahwa masyarakat muslim desa Boran tidak terlalu mengikutsertakan diri pada setiap tahapan pengelolaan dana desa , akan tetapi ketika ada

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmudi sebagai Kepala Desa di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Balai Desa Bloran pada tanggal 21 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Setianingsih sebagai Bendahara Desa di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Balai Desa pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 09.06 WIB

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Muiz sebagai Sekertaris BPD di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Bapak Abdul Muiz pada tanggal 28 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

pembangunan jalan raya atau apapun itu banyak masyarakat yang membantu kegiatan tersebut.<sup>8</sup>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya tahapan dalam pencairan dana sehingga pembangunan tidak bisa dilakukan secara serentak sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahapan ini masih kurang bias dan hanya sebagian masyarakat muslim yang mengikutsertakan diri dengan gotong royong dan sebagainya yang berkaitan dengan fisik. Hal ini juga didukung dengan hasil observasi peneliti dimana ketika ada pembangunan dan perbaikan jalan maka mereka ikut membantu.

### c. Penatausahaan

Penatausahaan pada tahapan pengelolaan dana desa merupakan tahapan yang hanya bendahara desa yang mengelola, dikarenakan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Data penelitian menjelaskan bahwa tahapan penatausahaan ini merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan dari pemasukan sampai pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran dan pencatatan nya pun memakai aplikasi namanya siskeudes sehingga lebih memudahkan saya untuk membuat laporan dan ini juga otomatis bisa langsung di lihat oleh kabupaten, provinsi, dan pusat.<sup>9</sup>

Pernyataan tersebut diartikan bahwa penatusahaan dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi siskeudes dan penatausahaan ini mencatat pengeluaran serta pemasukan dalam dana desa. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dari peneliti dimana bendahara desa melakukan pencatatan langsung dari aplikasi siskeudes sehingga memudahkan dalam pengerjaan dan penginformasian kepada pusat.

Selain itu, partisipasi masyarakat pada tahapan penatausahaan ini memang tidak dilibatkan. Data penelitian dari masyarakat muslim pesisir menjelaskan bahwa adanya ketidaktahuan secara pasti alur dari pengelolaan dana desa

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Nafisah bekerja sebagai Penjaga Toko di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Ibu Siti Nafisah pada tanggal 30 Juni 2021 Pukul 12.00 WIB

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Setianingsih sebagai Bendahara Desa di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Balai Desa pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 09.06 WIB

2020 dan memang adanya musyawarah yang dibahas terkait dana desa.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hasil dari wawancara tersebut masyarakat memang tidak mengikuti tahapan penatausahaan dan terkesan tidak begitu antusias dalam tahapan ini maka pemerintah desa menggabungkan semua tahapan pengelolaan dalam satu tahapan agar masyarakat dapat lebih muda menerima informasi dan lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan hasil dokumentasi peneliti dimana lebih banyak bendahara desa yang mengurus pada tahapan ini.

#### **d. Pelaporan**

Pelaporan pada tahapan pengelolaan dana desa merupakan kegiatan penyampaian yang dilakukan kepala desa kepada Bupati/Walikota. Data penelitian menjelaskan bahwa: tahapan pelaporan sendiri itu hampir sama dengan pertanggungjawaban mbak akan tetapi lebih banyak membuat laporan-laporan sehingga nanti di pertanggungjawaban dan bahan untuk rapat atau musyawarah, selain itu membuat papan informasi seperti yang ada di depan balai desa agar lebih mudah masyarakat dalam menerima informasi dan unuk partisipasi masyarakatnya sendiri dalam tahapan ini dilihat ketika mereka ke balai desa dan otomatis mereka bisa melihat anggarannya.<sup>11</sup>

Data lain juga didapatkan ketika penelitian, dimana ada dua tahapan pelaporan dan sistem penyampaiannya hampir sama yaitu pelaporan semester pertama disampaikan paling lambat bulan juli dan tahapan kedua paling lambat di bulan januari, ini nanti membuat laporan pelaksanaan APBDes dan kepala desa menyampaikan ke Bupati/Walikota dan juga BPD dan untuk partisipasi masyarakatnya pemerintah desa melakukan penggabungan tahapan menjadi satu yang nanti akan disampaikan oleh anggota BPD dan kepala dusun perwilayah sekaligus nanti ada penyaringan kebutuhan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmudi bekerja sebagai Nelayan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Bapak Mahmudi pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Muiz sebagai Sekertaris BPD di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Bapak Abdul Muiz pada tanggal 28 Juni 2021 Pukul 09.06 WIB

masyarakat, karena ini menurut pemerintah desa lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi.<sup>12</sup>

Adanya lepas tangan masyarakat terhadap tahapan-tahapan yang ada di pengelolaan dana desa sehingga masyarakat muslim pesisir memang tidak mengikuti pada tahapan pelaporan ini. Data penelitian menjelaskan bahwa memang untuk prosesnya itu jujur saya tidak mengikuti dikarenakan ketidakpahaman selain itu, juga karena kerja dan menurut masyarakat muslim pesisir desa Bloran adanya respon pemerintah yang baik dan untuk pembangunannya rata tidak ada hal yang mencurigakan.<sup>13</sup>

Analisis data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pada tahapan ini yaitu pembuatan laporan-laporan pelaksanaan APBDes yang dibuat oleh pemerintah desa dan disampaikan ke bupati/walikota dan juga BPD, pada tahapan ini masyarakat tidak berpartisipasi dengan alasan tidak memahami dan terlalu sibuk bekerja maka pemerintah desa menggabungkan semua tahapan menjadi satu. Data tersebut juga di dukung dengan hasil observasi dan dokumentasi peneliti dimana pelaporan ini dilakukan oleh pemerintah desa pada saat jam kerja dan masyarakat memang tidak terlibat sama sekali dan terlihat tidak tertarik melibatkan diri pada tahapan ini, mereka terkesan begitu percaya kepada pemerintah desa sehingga tidak melibatkan diri secara aktif.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Pada tahapan terakhir pengelolaan dana desa yaitu pertanggungjawaban dimana kepala desa membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Partisipasi masyarakat dalam tahapan ini memang perlu dilibatkan dikarenakan masyarakat merupakan subyek pembangunan. Data penelitian menjelaskan bahwa Pertanggungjawaban di Desa Bloran di sampaikan lewat infografis dan pemerintah desa membuat papan yang ada di depan balai desa selain itu disediakan website untuk

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Setianingsih sebagai Bendahara Desa di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Balai Desa Bloran pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Etika bekerja sebagai Pedagang Ikan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Ibu Etika pada tanggal 24 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB

menginformasikan akan tetapi untuk saat ini website nya belum disetting.<sup>14</sup>

Data lain juga didapatkan saat penelitian dimana pada tahapan pertanggungjawaban ini Pemdes memberikan laporan kepada Bupati/Walikota dan BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban nya maka nanti kami sampaikan kepada masyarakat pada saat musyawarah tingkat dusun perwilayah dilakukan.<sup>15</sup>

Partisipasi masyarakat pada tahapan pertanggungjawaban ini masih kurang jeelas, Data penelitian menjelaskan bahwa masyarakat tidak mengetahui secara jelas terkait tahapan dan mereka hanya mengetahui memang ada musyawarah untuk membahas kebutuhan desa dan adanya laporan kinerja akan tetapi balik lagi ketika masyarakat bekerja tentu tidak bisa hadir dan sebaliknya, dan ketika ke balai desater kadang melihat papan informasi dan terkadang juga tidak.<sup>16</sup>

Data-Data tersebut disimpulkan bahwa mekanisme pada tahapan ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa dengan memberikan laporan kegiatan kepada Bupati/Walikota dan juga BPD sedangkan masyarakat sendiri pertanggungjawaban disampaikan pada saat musyawarah tingkat dusun perwilayah yang disampaikan oleh BPD kepada kepala dusun dan juga anggota BPD untuk disampaikan lagi kepada masyarakat, selain itu ada papan informasi yang ditempatkan di kantor desa. Hal tersebut juga didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi dimana peneliti menemukan papan informasi yang ditempatkan di depan balai desa.

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Setianingsih sebagai Bendahara Desa di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Balai Desa pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 09.06 WIB

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik sebagai Ketua BPD di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Bapak Didik pada tanggal 21 Juni 2021 Pukul 13.40 WIB

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Syafii yang bekerja sebagai Nelayan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Bapak Imam Syafii pada tanggal 27 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

## 2. Data Faktor-Faktor yang dapat Mempengaruhi maupun Tidaknya Partisipasi Masyarakat Muslim Pesisir dalam Pengelolaan Dana Desa 2020

Sebuah partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam pemerintahan tak terkecuali pada setiap tahapan pengelolaan dana tingkat desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat baik faktor internal yaitu, pendidikan, ekonomi, jenis kelamin dan usia serta faktor eksternal yaitu interaksi dan transparansansi. Hasil penelitian sebagai berikut:

### a. Pendidikan

Banyak yang berpendapat bahwa pendidikan merupakan penentu seseorang dalam bertindak, dan dari pendidikan tersebut pula seseorang dapat dinilai dalam setiap tindakan. Akan tetapi data penelitian di Desa Boran berasumsi bahwa pendidikan tidak mempengaruhi masyarakat muslim pesisir di Desa Bloran dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa karena menurut Bapak Kasmudi percuma berpendidikan kalo dalam dirinya tidak peduli terhadap lingkungan sekitar jadinya kayak tidak memanfaatkan ilmunya dengan baik”<sup>17</sup>

Selain itu, menurut Bapak Didik sebagai Ketua BPD memberikan penjelasan bahwa pendidikan tidak begitu mempengaruhi karena seharusnya kesadaran diri sendiri, jika pendidikannya cukup tinggi tapi seseorang tersebut apatis tentu percuma dan disini sendiri yang berpartisipasi rata-rata juga lulusan terakhirnya SMP-SMA.<sup>18</sup>

Dari data tersebut juga dapat didukung dengan hasil observasi dimana mereka juga memberikan pernyataan tentang pendidikan terakhir, selain itu pada saat musyawarah tingkat dusun perwilayah maupun tingkat desa banyak masyarakat yang bersifat pasif dan hanya mengikuti alur dan ini juga didukung dengan dokumentasi yang didapatkan pada saat penelitian.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmudi sebagai Kepala Desa di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Balai Desa Bloran pada tanggal 21 Juni 2021 Pukul 09.00 WIB

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik sebagai Ketua BPD di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Ketua BPD pada tanggal 21 Juni 2021 Pukul 13.40 WIB

## b. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan setiap masyara memang berbeda-beda dan di Desa Bloran sendiri mayoritas masyarakat bekerja disektor perikanan dimana ketika mereka mulai aktif bekerja maka otomatis mereka mengahbiskan waktu yang cukup banyak dalam pekerjaannya. Dari data penelitian menurut Bapak Nur Aini pekerjaan merupakan factor yang dapat menghambat masyarakat muslim pesisir di Desa Bloran terhadap pengelolaan dana desa 2020 ketika diadakan rapat-rapat tingkat dusun perwilayah masyarakat seharusnya datang dan desa Bloran sendiri rata-rata pekerjaan masyarakat nya yaitu nelayan dari usia remaja sampai tua dan otomatis ketika mereka bekerja tidak dapat menghadiri musyawarah tersebut tapi memang tidak sepenuhnya mereka tidak melibatkan diri.<sup>19</sup>

Selain itu, sudut pandang masyarakat juga membenarkan bahwa pekerjaan merupakan faktor penghambat mereka dalam berpartisipasi. Seperti pendapat dari Bapak Mahmudi sebagai Nelayan yaitu: Ketika sudah bekerja sebagai nelayan biasanya bekerja sampai berhari-hari dan walaupun dirumah hanya memiliki waktu sehari atau dua hari dan itupun tergantung pada cuaca dan ketika bekerja otomatis tertinggal informasi dan tidak bisa mengikuti musyawarah yang diadakan, selain itu juga mereka yang bekerja memang di pemerintahan otomatis mereka selalu menyempatkan diri karena itu memang pekerjaanya lain lagi sama masyarakat yang kerjanya berbeda dengan mereka.<sup>20</sup>

Dari data tersebut maka masyarakat beranggapan bahwa jenis pekerjaan yang mereka tekuni memang mengahmbat mereka dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa, selain itu hasil observasi dan dokumentasi saat penelitian juga memperjelas bahwa ketika diadakan musyawarah tingkat dusun perwilayah hanya sedikit yang melibatkan diri dikarenakan masih sibuk dengan kegiatan masing-masing dan saat musyawarah tingkat desa

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Aini sebagai Sekertaris Desa di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Balai Desa Bloran pada tanggal 17 Juni 2021 Pukul 09.17 WIB

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmudi yang bekerja sebagai Nelayan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Bapak Mahmudi pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 13.30 WIB

berlangsung memang mereka yang memiliki kepentingan dan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing yang hadir.

**c. Jenis Kelamin dan Usia**

Jenis kelamin dan juga usia memang terkadang dapat mempengaruhi masyarakat tersebut dalam berpartisipasi maupun melakukan kegiatan. Data penelitian juga menjelaskan bahwa di Desa Bloran sendiri jenis kelamin dan juga usia menghambat masyarakat muslim pesisir dalam berpartisipasi hal ini terjadi juga dikarenakan adanya kebiasaan dimana pada saat musyawarah dominan yang berpartisipasi memang dari pihak laki-laki dan usianya diatas 25an.<sup>21</sup>

Selain itu, beberapa masyarakat Desa Bloran juga berpendapat bahwa jenis kelamin dan usia memang cukup menghambat mereka dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa 2020. Seperti pendapat dari Bapak Imam Syafi'i sebagai masyarakat nelayan dimana memang yang hadir dalam musyawarah tersebut rata-rata berusia cukup matang seperti berusia 30 dan usia yang relative muda itu sangat sedikit dalam menghadiri musyawarah tersebut.<sup>22</sup>

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu Etika, dimana ketika diadakan musyawarah mereka tidak mengikuti dan memang terbiasa yang hadir dari pihak laki-laki dan usia seseorang memang mempengaruhi karena memang pada kenyataannya yang datang saat musyawarah tersebut usia nya sudah berumur dan yang masih muda hanya sedikit yang terlibat.<sup>23</sup>

Analisis data tersebut juga didukung dengan hasil observasi dan dokumentasi saat penelitian dimana ketika musyawarah tingkat desa maupun dusun perwilayah berlangsung memang lebih didominasi dari pihak laki-laki dan dari wajah serta postur tubuh memang terlihat sudah

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Didik sebagai Ketua BPD di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Ketua BPD pada tanggal 21 Juni 2021 Pukul 13.40 WIB

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Syafii yang bekerja sebagai Nelayan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Bapak Imam Syafii pada tanggal 27 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Etika yang bekerja sebagai Pedagang Ikan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Ibu Etika pada tanggal 24 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB

cukup berumur sedangkan saat musyawarah tingkat desa berlangsung memang ada sebagian dari pihak perempuan tapi hanya sedikit dan rata-rata usianya pun terlihat sudah cukup matang.

#### **d. Interaksi dan Transparansi**

Masyarakat dalam berpartisipasi memang sangat beragam, agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik maka perlu bagi pemerintahan menerapkan interaksi yang baik pula terhadap masyarakat dan melakukan transparansi kepada masyarakat agar terjalin hubungan yang harmonis dalam suatu wilayah tersebut. Data penelitian menjelaskan bahwa interaksi dan transparansi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat Desa Bloran dalam berpartisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa 2020, dikarenakan dengan seringnya berinteraksi dengan masyarakat maka masyarakat sendiri akan merasa diperdulikan dan kita sebagai pemerintah desa juga harus terbuka atau transparan dengan mereka, seperti memperlihatkan info-grafis dan hal tersebut diharapkan agar masyarakat percaya dan merasa aman dengan pemerintah desa.<sup>24</sup>

Selain pernyataan diatas, menurut Ibu Etika masyarakat pesisir yang bekerja sebagai pedagang ikan mengungkapkan bahwa pemerintah desa Bloran dalam merespon masyarakat sangat baik dan terbuka, bahkan Kepala Desa di Desa Bloran sering membaur dengan masyarakat ketika diadakan acara-acara warga dan hal tersebut otomatis membuat masyarakat merasa dianggap.<sup>25</sup>

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Mahmudi yang bekerja sebagai nelayan, yaitu: Pemerintah desa Bloran sendiri sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar, hal ini dikarenakan rumah mereka yang berdampingan dengan warga dan ketika keluar disuatu tempat memang biasanya berpapasan selanjutnya adanya komunikasi antar warga dan pemerintah desa, sedangkan transparansi memang

---

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Setianingsih sebagai Bendahara Desa di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Balai Desa Bloran pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 09.06 WIB

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Etika yang bekerja sebagai Pedagang Ikan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Ibu Etika pada tanggal 24 Juni 2021 Pukul 15.00 WIB

mempengaruhi karena hal tersebut merupakan kunci mereka terbuka maupun tidaknya kepada masyarakat dan sejauh ini menurut saya sudah sangat terbuka tentang dana apapun dan kenyatannya ketika ada usulan dari masyarakat setidaknya terwujudkan dan berarti sudah baik.<sup>26</sup>

Analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat merasa di perdulikan oleh pemerintah desa dengan interaksi yang baik dan juga transparansi yang di tunjukan Pemdes kepada masyarakat sehingga terjalin kepercayaan antara satu sama lain. Selain hal tersebut, hasil observasi dari peneliti juga menunjukkan bahwa interaksi yang diberikan Pemdes saat masyarakat datang berkunjung ke balai desa sangat baik dan cepat selain itu ada beberapa warga yang hanya berkunjung ke balai desa dan Pemdes merespon dengan baik pula. Hasil dokumentasi juga didapatkan peneliti dengan adanya papan informasi terkait pengelolaan dana desa yang ada di depan pintu balai desa sehingga memudahkan masyarakat dalam menyimak informasi tersebut.

## C. Pembahasan

### 1. Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Muslim Pesisir Pantura dalam Pengelolaan Dana Desa 2020 di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang

Masyarakat pesisir adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal di daerah pesisir dan bergantung sumber pendapatannya dari sumberdaya laut tersebut. Masyarakat pesisir sendiri terdiri dari pemilik kapal, nelayan, pedagang ikan dan pengelola ikan. Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang yang terletak di pantura timur merupakan desa pesisir karena rumah penduduk berdekatan dengan laut dan mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor perikanan. Karakter masyarakat pesisir memang berbeda dengan masyarakat lain dimana nelayan dan pengelola ikan atau usaha perikanan merupakan mata pencaharian utama masyarakat pesisir selain itu karakteristik masyarakat pesisir juga dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu ketergantungan pada kondisi lingkungan, musim, pasar dan rentan terhadap pengaruh eksternal.

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahmudi yang bekerja sebagai Nelayan di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang di Kediaman Bapak Mahmudi pada tanggal 23 Juni 2021 Pukul 13.30 WIB

Dari uraian informan yang telah diteliti maka karakteristik masyarakat pesisir di desa bloran memang ada ketergantungan pada musim dimana musim maupun cuaca merupakan faktor utama masyarakat bekerja melaut dengan kondisi seperti ini maka dapat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat pesisir karena ketika cuaca baik maka para nelayan pada sibuk melaut sehingga dapat membantu perekonomian sedangkan ketika cuaca buruk dan musim penceklik maka masyarakat pesisir kehilangan pekerjaan dan terpaksa menganggur sampai musim dan cuaca kembali baik. Selain ketergantungan pada musim, ketergantungan pada pasar juga mempengaruhi masyarakat pesisir dalam mendapatkan pemasukan dimana ketika harga pasar anjlok dikarenakan stok ikan yang sangat banyak maka ada penurunan pendapatan.

Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber pendapatan yang berupa dana desa. Dana Desa harus dikelola secara tertib dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa diberikan sumber dana serta kewenangan yang memadai yang bertujuan untuk mengatur potensi yang dimiliki. Berikut rincian pendapatan dana yang diterima di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2020 :

Tabel 4.1

Rincian Pendapatan Dana Desa Bloran yang diterima Tahun 2020

| <b>Jenis Pendapatan Desa</b>   | <b>Anggaran</b>          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Dana Desa                      | Rp. 800.138.000          |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp. 38.858.300           |
| Alokasi Dana Desa              | Rp. 418.385.000          |
| Bantuan Keuangan Provinsi      | Rp. 405.000.000          |
| Bantuan Keuangan Kabupaten     | Rp. 200.000.000          |
| <b>Total</b>                   | <b>RP. 1.862.381.300</b> |

Sumber : kebloran-rembang.desa.id

Kegunaan dana desa dalam setiap proses pembangunan diharapkan dapat mengurangi perbedaan pembangunan yang terjadi di kota dan desa. Pembangunan yang diperlukan adalah perbaikan yang mensejahterakan masyarakat, dimana pembangunan tersebut menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Untuk itu diperlukan kerjasama oleh setiap

komponen masyarakat dengan tujuan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Bloran memang ada tahapannya akan tetapi mengalami tumpang tindih dikarenakan adanya penggabungan pada setiap tahapan seperti perencanaan, pelaksanaa, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam sekali tahapan yang disampaikan pada tahapan perencanaan. Penggabungan ini tentu ada alasannya agar masyarakat dapat mudah menerima informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa.

Kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat terkait pentingnya keikutsertaan dalam setiap tahapan pengelolaan desa menjadikan masyarakat bersifat apatis dan pasif serta terkesan hanya mengikuti alur yang di buat pemerintah desa.

#### **a. Tahapan Perencanaan**

Proses perencanaan harus dilakukan sesuai dengan rencana, prioritas, agenda kegiatan dan setiap kegiatan memiliki hasil yang jelas. Sementara itu, dalam penyaluran pendapatan desa seharusnya dana desa terfokus pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa harus mampu meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian dalam menyusun rencana yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pada hasil data peneliti menjelaskan bahwa ada tiga tahapan di dalam perencanaan dimana pra musdes, musdes dan musrenbang adalah tahapan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKPDDes) sebagai bahan APBDes dalam satu tahun berjalan. Berikut tahapan perencanaan yang ada di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang:

- 1) Pra Musdes atau Musdus, tahapan awal ini diawali dengan diadakannya musyawarah tingkat dusun perwilayah yang diselenggarakan oleh kepala RT setempat dan dihadiri anggota BPD, RT, RW setempat dan juga masyarakat. Tujuan diadakannya tahapan ini untuk menentukan dan memfokuskan kebutuhan serta prioritas masyarakat di setiap wilayah per dusun.
- 2) Musdus, Selanjutnya yaitu musdes, forum ini dimonitori oleh BPD dan dihadiri oleh perwakilan BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, tahapan ini hampir sama dengan

- musdus tetapi ada tambahan yang hadir yaitu perwakilan dari keluarga difabel dan masyarakat miskin yang ada di desa Bloran. Pembahasan forum ini lebih strategis karena membahas laporan hasil penelitian dari kondisi masalah perwilayah desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas di 4 bidang kegiatan yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Tahapan terakhir dari perencanaan yaitu musrenbang dimana tahapan ini merupakan forum tertinggi yang ada di desa Bloran dan diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa dan RKPDesa inilah yang menjadi dasar penyusunan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa).

Ketiga tahapan dalam perencanaan pengelolaan dana desa tersebut pada intinya untuk menyusun RKP dan RPJM untuk bahan APBDes melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, akan tetapi masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam setiap tahapan sehingga masyarakat mengetahui proses pengambilan keputusan sesuai dengan fungsinya masing-masing malah tidak dilibatkan sehingga partisipasi masyarakat di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sangat minim.

Seharusnya tahapan yang paling dinamis dalam menata pembangunan desa yaitu menggunakan dukungan dari sosialisasi serta hadir saat musyawarah pembangunan desa, Untuk memperoleh prioritas pembangunan yang paling dibutuhkan masyarakat maka pengambilan keputusan diambil dari yang paling besar dan mendesak. Prioritas tersebut didapat dari usulan masyarakat sehingga perencanaan pembangunan dilakukan sesuai kebutuhan yang paling mendesak. Prioritas perencanaan pembangunan ini haruslah berasal dari seluruh kalangan masyarakat bukan hanya berasal dari usulan para stakeholder dan usulan ini di musyawarahkan sehingga menghasilkan keputusan sesuai dengan yang diprioritaskan.

Pada tahapan perencanaan ini sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang perencanaan yang dimulai dari pemerintah desa menyiapkan rencana pembangunan desa sesuai kebutuhannya dengan berpedoman

pada perencanaan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa yang disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang disusun selama enam tahun dan Rencana Pembangunan Desa Tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa selama satu tahun. Setelah APBDes ditetapkan maka pelaksanaan keuangan desa mengikuti APBDes. Akan tetapi partisipasi masyarakat tidak dilibatkan dalam semua tahapannya.

#### **b. Tahapan Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atas hal-hal yang telah disusun dengan berpedoman APBDes. Pelaksanaan suatu gerakan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ditempatkan sesuai dengan kemampuan. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Bloran secara umum diawali dengan pembuatan RAB untuk pengajuan pendanaan. Dengan adanya RAB maka dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, setelah menyusun RAB maka pelaksana kegiatan mengajukan SPP, selain itu pemerintah desa Bloran melakukan pencatatan uang melalui rekening kas desa. Data tersebut belum sesuai dengan yang diharuskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil lain dari penelitian pada tahap pelaksanaan juga menjelaskan bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam program pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, pembangunan desa dsb.

Tingkat partisipasi pada tahap pelaksanaan ini adalah tingkat minat serta tindakan masyarakat dalam melakukan setiap perbaikan pembangunan yang telah disusun, khususnya mulai dari pelaksanaan pertemuan, hingga eksekusi terhadap pembangunan yang telah direncanakan.

Hasil penelitian didapati bahwa hanya sebagian warga yang melibatkan diri dengan ikut serta sebagai pekerja atau hanya sekedar membantu dalam bentuk gotongroyong, keterlibatan ini biasanya dinamakan swakelola. Alasan sebagian masyarakat yang tidak melibatkan diri pada tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa karena kesibukan aktivitas mereka sedangkan alasan dari pemerintah desa yaitu penggabungan pada tahapan sehingga lebih efisien.

### c. Tahapan Penatausahaan

Penatausahaan dikendalikan oleh Bendahara Desa yang memiliki tanggung jawab dan wajib mencatat pemasukan, pengeluaran serta pelaporan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes secara tertib dan menyelesaikan pembukuan setiap akhir bulan. Penatausahaan ini dikerjakan dengan menggunakan sistem keuangan perdesaan (siskeudes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bendahara Desa Bloran sudah menjalankan sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Partisipasi masyarakat pada tahapan penatausahaan ini memang tidak dilibatkan dikarenakan hanya pemerintah desa yang dapat menghendel penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

### d. Tahapan Pelaporan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 68-69 dimana kepala desa membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat bulan Juli. Selain itu, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menginformasikan semua kegiatan kepada masyarakat. Penyusunan laporan dilakukan dengan cara penggabungan seluruh laporan yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.

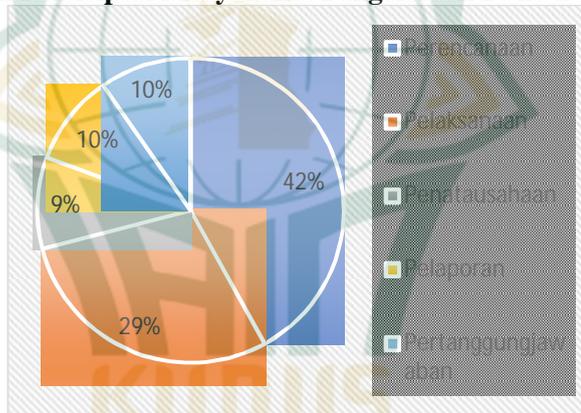
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan kepala desa sudah dijalankan sesuai peraturan yaitu penyampaian laporan pada bulan Juli. Pada tahapan ini partisipasi masyarakat tidak dilibatkan secara langsung melainkan pelaporannya disampaikan kepada perwakilan masyarakat untuk kemudian disampaikan lagi pada saat musyawarah tingkat dusun perwilayah.

### e. Tahap Pertanggungjawaban

Setiap tahapan dalam pengelolaan dana desa memang perlu untuk di pertanggungjawabkan kepada beberapa pihak yang berkaitan. Pemerintah desa wajib memberikan laporan realisasi dana desa secara tertulis kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Hal tersebut sudah tertera dala Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 70-71. Selain pelaporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota pelaporan

pertanggungjawaban juga perlu disampaikan kepada masyarakat karena masyarakat merupakan subjek dalam pembangunan. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penggabungan pada tahapan pengelolaan dana desa sehingga pertanggungjawaban kepada masyarakat disampaikan menjadi satu saat musyawarah tingkat dusun perwilayah dilaksanakan. Meskipun ada penggabungan dalam tahapan pengelolaan desa yang bertujuan agar lebih efisien dan memudahkan masyarakat dalam menerima informasi yang diberikan, partisipasi masyarakat desa Bloran masih cenderung rendah karena tidak mengikuti atau menyaksikan pelaporan tersebut hanya beberapa masyarakat yang mengikuti dan bersifat tidak tetap atau masyarakat yang berpartisipasi berubah-ubah.

**Gambar 4.1**  
**Tahapan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Dana Desa 2020**



Partisipasi politik sendiri diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses politik meliputi membuat, melaksanakan serta mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan. Pengertian tersebut juga diterapkan di masyarakat pesisir desa Bloran dimana masyarakat pesisir ikut serta dalam setiap proses politik seperti ikut musyawarah, datang saat pemilihan pemerintah, memberikan usulan yang berkaitan dengan desa dan sebagainya akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa tidak semua masyarakat ikut melibatkan diri dalam sistem politik. Desa Bloran sendiri partisipasi politik masyarakatnya sudah sesuai dengan partisipasi politik dalam prespektif islam, dimana

musyawarah atau *syura* merupakan unsur penting dalam membuat keputusan bersama. Selain itu, pemerintah desa dan juga masyarakat muslim desa Bloran menerapkan nilai-nilai yang tertera dalam prespektif islam menurut Fatahullah Jurdi yaitu nilai keadilan, kejujuran dan juga nilai kebebasan. Masyarakat muslim desa Bloran sudah menetapkan nilai kejujuran dan juga nilai kebebasan dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan memberikan usulan sesuai dengan kebutuhan desa serta memberikan kritikan maupun arahan pada saat musyawarah pengelolaan dana desa 2020. Sedangkan jika dilihat dari pemerintah desa Bloran juga sudah menetapkan nilai kejujuran dan juga kebebasan, dimana pemerintah desa mengadakan musyawarah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan juga pemerintah desa Bloran memberikan kebebasan kepada masyarakat muslim desa Bloran dalam hal berpendapat, berpesan maupun masukan kepada pemerintah desa dan hal tersebut di peroleh dari musyawarah tingkat dusun perwilayah.

Jika dilihat dari jenis partisipasi yang dikemukakan oleh Rizal Andreeyan, maka jenis partisipasi masyarakat muslim pesisir di Desa Bloran dalam pengelolaan dana desa 2020 yaitu melalui pikiran, tenaga serta keahlian. Partisipasi dengan jenis pikiran bisa dilihat pada saat tahapan perencanaan yaitu dengan keikutsertaan mereka dalam musyawarah tingkat dusun perwilayah, dengan mereka hadir dalam musyawarah tersebut maka mereka membuka pikiran untuk menerima serta memberikan masukan ketika acara dilaksanakan, sedangkan jenis keahlian dan tenaga ditunjukkan masyarakat pesisir desa Bloran dalam tahapan pelaksanaan dimana mereka yang memilki keahlian dalam proyek pembangunan maka diikutsertakan. Sedangkan dilihat dari kegiatannya partisipasi masyarakat pesisir desa Bloran dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa 2020 bersifat pasif dan juga spectators (penonton). Partisipasi politik pasif memiliki arti suatu kegiatan yang hanya mengikuti hal-hal yang sudah menjadi keputusan pemerintah dan dari sistem politiknya hanya ada aspek pengeluaran. Sedangkan yang dimaksud penonoton disini yaitu masih banyaknya masyarakat pesisir desa Bloran yang bersifat pasif dengan tidak memberikan atensi penuh kepada setiap tahapan

pengelolaan dana desa dan terkesan hanya mengikuti alur yang sudah dibentuk oleh pemerintah desa.

## **2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi maupun Tidaknya Partisipasi Masyarakat Pesisir Pantura Timur dalam Pengelolaan Dana Desa 2020 di Desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang**

Hasil penelitian dapat disimpulkan ada beberapa faktor pendukung maupun penghambat tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam setiap kegiatan pengelolaan dana desa tahun 2020 di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Satria maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu:

**a. Faktor Internal** (dari diri sendiri) merupakan karakteristik pribadi yang dapat mempengaruhi diri sendiri dalam suatu kegiatan. Karakteristik pribadi meliputi usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan dan pengalaman bersosialisasi. Ada beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi partisipasi tersebut, yaitu:

### **1) Pendidikan**

Kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya sangat menghargai kegiatan-kegiatan yang mengarah ke perbaikan desa, baik perbaikan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swadaya masyarakat. Melalui pendidikan yang tinggi ini mereka memahami pentingnya berpartisipasi dalam setiap urusan pemerintahan sehingga mereka pada umumnya merasa senang dan puas ketika ikut terlibat, namun sebaliknya jika masyarakat berpendidikan rendah maka mereka kesulitan untuk mengerti dan memahami pentingnya berpartisipasi dalam setiap urusan pemerintahan. Karena faktor itulah yang menyebabkan minimnya perhatian masyarakat dalam setiap program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Kenyataan ini menjelaskan bahwa betapa besar dampak pendidikan terhadap partisipasi masyarakat terhadap kemajuan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bukan merupakan faktor pengaruh masyarakat pesisir Desa Bloran dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Pada saat musyawarah dusun perwilayah dilaksanakan mereka

yang hadir tentu beragam jika dilihat dari pendidikan terakhirnya, hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor kesadaran dan kebiasaan yang mempengaruhi mereka dalam setiap proses pengelolaan dana desa 2020.

## 2) Pekerjaan

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat desa Bloran sendiri yaitu bekerja di sektor perikanan, dimana pekerjaan ini cukup menyita banyak waktu masyarakat karena jika mereka sudah bekerja melaut maka waktu dirumah hanya sebentar sehingga sulit membagi waktu untuk melibatkan diri dalam setiap tahapan pengelolaan desa. Jika dilihat dengan teori yang dijelaskan Muhammad Yusuf maka sesuai dengan apa yang terjadi di desa Bloran, dimana pada umumnya individu dengan jenis pekerjaan tertentu akan benar-benar meluangkan waktu atau bahkan tidak sama sekali terhadap kegiatan tertentu, seringkali alasan masyarakat yaitu pertentangan antara kewajiban bekerja dengan keinginan untuk mengambil bagian.

Alasan utama masyarakat pesisir desa Bloran tidak terlalu aktif melibatkan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa 2020 yaitu karena pekerjaan yang mereka tekuni, Hasil penelitian pun juga diperlihatkan bahwa masyarakat lebih memilih menyibukan diri dengan pekerjaan mereka dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Hal ini tentu saja kurang efektif karena masyarakat merupakan komponen utama dalam perubahan desa itu sendiri sehingga partisipasi dalam setiap tahapan apapun tentu perlu dilibatkan.

## 3) Usia

Semakin bertambahnya usia seseorang, maka siklus pertumbuhan daya pikir seseorang semakin meningkat namun pada usia tertentu bertambahnya proses tersebut tidak secepat seperti ketika remaja. Berdasarkan pengamatan saat penelitian usia 19-60 tahun tidak begitu memahami program dana desa serta mekanisme pengelolaan dana desa dan ketika musyawarah dilakukan mayoritas usia yang terlibat diatas 25 tahun hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat saat musyawarah

dilaksanakan dan juga rasa minder seseorang karena perbedaan usia.

Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan teori Arief Setyawan yang menjelaskan bahwa usia per orang cukup matang pada umumnya akan mengambil bagian lebih dari pada kelompok usia lainnya. Pada kenyataannya di Desa Bloran usia memang cukup mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi.

#### 4) Jenis Kelamin

Pada dasarnya ada perbedaan antara otak laki-laki maupun perempuan dalam hal menerima maupun memberikan informasi. Desa bloran sendiri masyarakat dengan gender laki-laki dengan perempuan hampir seimbang, hal ini juga mempengaruhi partisipasi masyarakatnya dalam proses pengelolaan desa dimana pihak perempuan di desa bloran tidak begitu tertarik dengan proses pengelolaan desa dan adanya faktor kebiasaan masyarakat desa bloran dimana pihak laki-laki yang seharusnya datang saat diadakannya musyawarah.

Sesuai dengan teori Arief Setyawan, dimana hal ini sudah menjadi standar di negara kita, pada umumnya tugas perempuan hanyalah mengurus keluarga sehingga hal ini secara tidak langsung laki-laki memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengikuti setiap program. Pihak laki-laki di desa Bloran memang banyak melibatkan diri dalam mekanisme pengelolaan dana desa meskipun tidak keseluruhan tahapan akan tetapi pihak laki-laki memang lebih unggul partisipasinya dari pihak perempuan.

- b. Faktor Eksternal** (datang dari luar individu) merupakan hubungan antara pengelola proyek dengan target yang dapat mempengaruhi partisipasi karena target akan dengan sukarela mengawasi proyek jika pihak pengelola memberikan respon yang positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, jika ada dukungan layanan dari pengelola proyek secara aktif maka target tanpa ragu-ragu dalam berpartisipasi. Dibawah ini akan dijelaskan tentang faktor eksternal dari informan peneliti yaitu tingkat intensitas interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dan tingkat transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa 2020 di desa Bloran Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

**1) Tingkat Intensitas Interaksi**

Tingkatan ini diartikan seberapa seringnya pemerintah desa berinteraksi dengan masyarakat dalam segala aspek, diantaranya bertanya mengenai kepuasan masyarakat dalam sistem pemerintah dan membaurnya pemerintah desa saat masyarakat ada kegiatan. Desa Bloran sendiri tingkat intensitas interaksi pemerintah terhadap masyarakat cukup baik.

**2) Tingkat Transparansi**

Tingkatan ini diartikan seberapa transparansi pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan dana desa tahun 2020 di desa bloran dan tanggung jawab terhadap semua proses pengelolaan sampai penganggarannya. Trasnparansasi juga merupakan bentuk kebebasan masyarakat dalam menerima informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa serta memudahkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Penelitian di desa pesisir bloran menunjukkan bahwa pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat selalu open access lewat papan infografis yang ada di balai desa dan adanya penyampaian informasi lewat perwakilan dari setiap ketua dusun maupun RT.

Tabel 4.2

Faktor yang mempengaruhi maupun tidaknya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa 2020

| <b>Faktor Penghambat</b> | <b>Faktor Pendukung</b> |
|--------------------------|-------------------------|
| Pekerjaan                | Pendidikan              |
| Jenis Kelamin            | Interaksi               |
| Usia                     | Transparansasi          |

Hasil dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor internal maupun eksternal masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa tahun 2020 di desa Bloran, faktor paling umum yaitu faktor internal dimana pekerjaan, jenis kelamin, usia dan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan desa sangat besar dikarenakan ketika masyarakat bekerja melaut ataupun pekerjaan lain otomatis partisipasi terhadap pengelolaan dana desa mereka terputus sehingga banyak masyarakat menyerahkan semua urusan yang bersumber

dari desa kepada pemerintah desa maupun perwakilan dari desa. Hal ini juga didukung faktor eksternal dimana pemerintah desa Bloran melakukan transparansi dalam segala aspek dan juga seringnya pemerintah desa melakukan intensitas interaksi kepada masyarakat sehingga dapat memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat desa Bloran dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa 2020 tentu memiliki alasan tersendiri, akan tetapi jika dilihat dalam perspektif islam transparansi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat muslim dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa 2020 di Desa Bloran. Pemerintah desa Bloran sudah menerapkan transparansi sesuai dengan perspektif islam dilihat dengan keterbukaan atau *open acces* pemerintah desa terhadap masyarakat serta adanya papan informan yang disediakan oleh desa agar lebih memudahkan masyarakat muslim desa bloran dalam mencari informasi. Dengan hal tersebut masyarakat muslim desa Bloran memberikan kepercayaan dan juga rasa menghormati terhadap pemerintah desa, dan hal ini tentu sejalan dengan apa yang ditafsirkan oleh Quraish Shihab dimana dijelaskan tentang kewajiban mentaati atau menghormati Ulil Amri.